



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI DAN DENDA DI  
PEGADAIAN SYARIAH LHOKSEUMAWA  
(*SHARIA ECONOMIC LAW REVIEW TOWARD  
ADMINISTRATION COSTS AND FINES IN SHARIA  
PAWNSHOP IN LHOKSEUMAWA*)**

**Yoesrizal M. Yoesoef**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Lhokseumawe

yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id

**Nisak Khalista**

Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

Nisakkhalista1@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan tentang biaya administrasi dan denda di pegadaian syariah Lhokseumawe ditinjau dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan timbulnya keraguan di kalangan masyarakat terkait penetapan biaya administrasi dan denda terhadap nasabah di Pegadaian tersebut. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan dan tujuan penetapan biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe adalah untuk kepentingan administrasi dan sebagai motivasi kepada nasabah agar disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah penetapan biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XIV tentang *RAHN*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, hanya saja pihak pegadaian harus lebih teliti dalam membedakan antara nasabah mampu dengan yang tidak mampu dalam penetapan biaya denda.

Kata Kunci : HES, Biaya Administrasi, Denda, Pegadaian Syariah.

**ABSTRAC**

This study explains the administrative costs and penalties in the sharia pawnshop in Lhokseumawe reviewed with sharia economic law due to arising of doubts in the community regarding the determination of administrative costs and penalties for the pawnshop's customers. The results of this study show that the reasons and the aims of determining administrative costs and fines in the Lhokseumawe Sharia Pawnshop were for administrative

purposes and as a motivation for customers to be discipline in carrying out their obligations. In Sharia Economic Law observation, the determination of administrative costs and fines in the Lhokseumawe Sharia Pawnshop is in accordance with the Sharia Economic Law Compilation (KHES) CHAPTER XIV concerning RAHN, National Sharia Board Fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning RAHN and Sharia Board Fatwa National No: 17 / DSN-MUI / IX / 2000 concerning sanctions for wealth customers who delay the payments, however the pawnshop must be more careful in distinguishing between wealth and poor customers who cannot afford the cost of fines.

Keywords: Sharia Economic Law, Administrative Costs and Fines, Sharia Pawnshop.

## PENDAHULUAN

Akad Gadai merupakan suatu transaksi dimana seseorang yang berpiutang dapat memperoleh hak menyimpan suatu barang jaminan yang diserahkan oleh orang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya. Serta memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut jika sewaktu-waktu orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.<sup>1</sup>Gadai syariah yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Dewasa ini kegiatan ekonomi semakin mudah dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan yang memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap masyarakat dengan sistem pinjaman dengan jaminan

barang atau yang dikenal dengan akad *Rahn*.

Pembiayaan *Ar-RAHN* ini memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan jaminan yang dipegang oleh pegadaian syariah. Atas pemeliharaan jaminan tersebut, pegadaian syariah akan mengenai biaya pemeliharaan tersebut. Keberadaan pegadaian syariah dimaksud untuk melayani masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, dengan menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman dengan berbasis jaminan. Namun pada kenyataannya, masih sedikit sekali pemanaan masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang dikeluarkan oleh pihak lembaga ini Sehingga masih minimnya jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 387.

---

<sup>2</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 54.

Pada pegadaian konvensional nasabah dikenakan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, namun pada pegadaian syariah biaya di tetapkan sekali dan dibayarkan di muka, yang ditujukan sebagai pembiayaan terhadap penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. Dalam pandangan syara' *Rahn* adalah suatu akad yang menjadikan suatu barang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, sehingga seluruh ataupun sebagian hutang dapat diterima.<sup>3</sup> Tetapi dalam praktiknya, pegadaian syariah masih saja diragukan kesyariahnya karena beberapa alasan: pertama, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad. Kedua, terjadi riba yang dikenal oleh masyarakat dengan istilah (biaya simpan) atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang) antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. Ketiga, terjadi kekeliruan pemahaman dan keraguan masyarakat dalam pembebanan biaya simpanan, administrasi serta denda padahal telah diatur dengan jelas dalam Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/IX/2002 dan dalam KHES mengenai *Rahn*. Mengenai pembebanan berbagai biaya pada pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan dalam perekonomian syariah, dengan

demikian kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah. Sehingga butuh penyesuaian antara pemahaman masyarakat dengan praktek di pegadaian syariah untuk menepiskan segala keraguan dan kesalahpahaman dalam masyarakat.

Gadai yang ditawarkan oleh pegadaian syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* emas, yang menyatakan bahwa *RAHN* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *RAHN*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *RAHN*, prinsip dasar gadai syariah adalah prinsip gadai yang barang jaminan hutangnya dibatasi pada emas. Dalam fatwa tersebut menerangkan adanya biaya pemeliharaan barang, namun tidak menerangkan kejelasan tentang biaya administrasi serta pembayaran denda atas keterlambatan pelunasan hutang dari nasabah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XIV tentang *RAHN*, pada bagian kedelapan terkait penjualan harta *RAHN*, dalam pasal 403 ayat (1) dan ayat (2) tidak menerangkan tentang adanya biaya denda

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 105.

dari keterlambatan pelunasan hutang, sehingga menimbulkan keingintahuan penulis untuk mengkaji serta mencari kejelasan hukum terkait biaya tersebut. Selain itu dalam pasal 401 dalam KHES menerangkan tentang biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai tetapi tidak menyebutkan tentang adanya biaya administrasi, namun ada pengecualian pada ketentuan lain yang di tetapkan dalam akad. Secara tersirat dapat dipahami bahwa adanya ketidakjelasan hukum terkait biaya administrasi dan denda di pegadaian syariah. Mengenai biaya denda, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, biaya denda hanya boleh dibebankan terhadap nasabah yang mampu saja, lalu bagaimana dengan nasabah yang memang tidak mampu dan tetap dikenakan biaya denda oleh pihak pegadaian. Sejauh mana pegadaian mampu mengukur dan membedakan antara nasabah mampu dengan nasabah yang memang benar-benar tidak mampu. Apakah selama ini biaya denda benar diterapkan hanya untuk nasabah mampu dan menunda-nunda pembayaran atau ditetapkan secara merata tanpa mempertimbangkan apakah nasabah tersebut mampu atau tidak. Kemudian, Sebagaimana peraturan yang tercantum

pada Fatwa DSN-MUI mengenai *Rahn*, biaya tersebut dibolehkan dan ditanggung oleh *Rahn*. Selain itu, penulis juga membahas mengenai kesesuaian antara barang gadai dengan jumlah penaksiran biaya administrasi yang ada pada pegadaian syariah.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai biaya administrasi serta pembayaran denda dalam bentuk uang di pegadaian syariah Lhokseumawe ditinjau dari kacamata hukum ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Gadai syariah

Menurut bahasa, gadai adalah penetapan dan penahanan, sedangkan menurut istilah gadai adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam literatur Fiqh Muamalah, gadai disamakan dengan *Rahn*.<sup>5</sup> Akad *RAHN* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya barang gadai baru dapat

---

<sup>4</sup>Wawancara Awal Dengan Hera Wahyuni, mahasiswa Universitas Malikussaleh Yang sedang menjalankan praktek magang Di Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Selasa Tanggal 22 Mei 2018.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 105-106.

diserahkan kembali kepada pihak yang berhutang apabila hutangnya sudah lunas.<sup>6</sup>

## B. Landasan Hukum Gadai dalam Islam

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan gadai adalah berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah Saw yaitu:

### 1. Alquran

Adapun dalil pelaksanaan gadai adalah sebagai berikut :

- a. **Alquran** Surah Al-Baqarah Ayat 282 yang Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak*

*ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.....”*

- b. dalam Surah Al- Baqarah Ayat 283 yang Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak ada seorang penulis, hendaklah ada barang yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”*

### 2. Hadits, diantaranya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Abi Hurairah ra. Telah bersabda rasulullah SAW. “tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan boleh diperah susunya dengan menanggung biayanya, bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu*

<sup>6</sup>Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.....*, h. 400.

*wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharannya*<sup>7</sup>

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa akad RAHN memang sudah adacpada masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak perlu diherankan lagi apabila transaksi tersebut masih aktif terjadi hingga hari ini.

### C. Rukun Dan Syarat Dalam Akad Gadai

Adapun rukun dan syarat *Rahn* sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 373 adalah:

1. Rukun akad *Rahn* terdiri dari *Murtabin*, *Rabin*, marhun, marhun bih, dan akad.
2. Dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel, yaitu : Qardh, *Rahn*, dan ijarah.
3. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak, baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarah.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 374 sampai 376 menerangkan bahwa para pihak yang melakukan akad *Rahn* harus cakap hukum, tidak dibenarkan bagi anak-anak, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan orang lain untuk bertransaksi. Selanjutnya akad *Rahn*

baru bisa dikatakan sempurna apabila marhun telah diterima oleh *Murtabin*, baik itu barangnya langsung atau surat berharga yang menyangkut keabsahan barang tersebut, seperti sertifikat rumah, surat tanah, dan lain-lain. Selain itu marhun yang dijadikan jaminan tersebut harus ada dan nyata serta merupakan barang berharga yang bernilai harganya, karena apabila sewaktu-waktu *Rabin* tidak bisa membayar hutangnya maka barang tersebut bisa dilelang untuk pelunasan hutang tersebut.<sup>8</sup>

Adapun jenis barang-barang yang dapat dijadikan jaminan pada pegadaian syariah antara lain:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang disebut dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya.
2. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televise, komputer, dan sebagainya.
3. Kendaraan, seperti motor, mobil, dan sebagainya.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, seperti:

1. Barang-barang yang berbahaya, seperti bom, granat, bahan peledak, dan sebagainya.

<sup>7</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta : Daar Al Fikry, 2010), h. 149.

<sup>8</sup>Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 105

2. Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat, kereta api, dan sebagainya.
3. Barang-barang yang sulit dalam penyimpanan dan pemeliharaannya, seperti tanaman, hewan, dan sebagainya.

Terkait hak *Rabin* dan *Murtabin* dalam pasal 395 KHES menerangkan bahwa, *Rabin* dan *Murtabin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga. Boleh meminjamkannya jika ada persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam pasal berikutnya juga disebutkan bahwa *Murtabin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin *Rabin*, dapat kita pahami bahwa marhun hanya dijadikan jaminan saja dalam akad *Rahn*, sehingga *Murtabin* tidak bisa memanfaatkan marhun sesuka hatinya, karna kepemilikan barang tersebut masih atas nama *Rabin*, hanya saja keberadaannya pada saat akad *Rahn* berlangsung adalah sebagai jaminan yang di pegang oleh *Murtabin*.

Kemudian terkaid masalah penyimpanan marhun, *Murtabin* dapat menyimpannya sendiri, ataupun meyerahkannya kepada pihak ketiga, dengan pembayaran biaya penjagaan barang tersebut dan harus ada izin dari semua pihak yang bersangkutan, kekuasaan yang diperoleh oleh penjaga marhun sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penerima marhun yaitu *Murtabin*, namun

bedanya si penjaga marhun tersebut hanya sebagai pihak ketiga yang menjaga saja, sedangkan *Murtabin* ia selain menerima barang gadai juga memberikan hutang dalam bentuk pinjaman dengan jaminan kepada *Rabin*.<sup>9</sup>

Dalam akad *Rahn* tidak boleh ada syarat-syarat yang memberatkan sebelah pihak, seperti persyaratan apabila *Rabin* tidak bisa melunasi hutangnya maka marhun menjadi milik *Murtabin*. Karena bisa jadi harga marhun lebih tinggi dari hutang si *Rabin*, sehingga ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus sesuai dalam praktek *Rahn* yang dijalankan, dimana apabila *Rabin* tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka marhun akan dilelang dan hasil penjualannya hanya bisa diambil oleh *Murtabin* sesuai dengan nilai hutang dan selebihnya harus diserahkan kepada *Rabin*.

Sedangkan masalah pembeli dari marhun tersebut, boleh saja *Murtabin* yang membelinya, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu, yaitu waktu pelelangan serta penjualan marhun. Hak *Murtabin* dari penjualan tersebut hanya sebesar hutang si *Rabin* saja, selebihnya di serahkan kepada *Rabin*. Apabila harga marhun kurang dalam artian tidak cukup,

---

<sup>9</sup>Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....*, h. 110

karena faktor penurunan harga dan sebagainya, maka *Rahin* masih menanggung hutang sisa tersebut.

#### D. Biaya Administrasi dan Denda

##### 1. Biaya Administrasi

Sebelum memahami biaya administrasi secara langsung, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu makna dari biaya dan administrasi itu sendiri. Secara sempit biaya merupakan pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva, secara luas biaya mengandung arti pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang sudah terjadi atau akan terjadi untuk tujuan tertentu.<sup>10</sup> Sedangkan administrasi berarti proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Dari pengertian biaya dan administrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa biaya administrasi merupakan sejumlah uang yang dipungut dari nasabah dalam berbagai transaksi ekonomi yang berguna untuk kelancaran pelaksanaan administrasi dan jumlahnya tergantung kebijakan masing-masing lembaga.

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak di bidang sosial dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syariah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.<sup>12</sup> Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad hingga berakhirnya akad pembiayaan. Sedangkan menurut Sulhan biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional, seperti alat tulis kantor, materai, keperluan notaris dan lain-lain.<sup>13</sup>

Pada lembaga keuangan syariah penetapan biaya administrasi dalam setiap produk penyaluran dana, baik dalam akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, seperti murabahah, salam, istisna, maupun akad yang keuntungannya tidak bisa dipastikan di awal, seperti mudharabah

<sup>10</sup>Iman Firmansyah, *Akuntansi Biaya*, (Bandung: Dunia Cerdas, 2013), h. 1.

<sup>11</sup>Mintarjo, *Administrasi Bank*, (Surabaya: Erlangga, 2013), h. 4.

<sup>12</sup>Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 37.

<sup>13</sup>Abbas Kartadinata, *Akuntansi Dan Analisis Biaya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 24.



dan musyarakah. Besaran biaya administrasi memang ditetapkan pada sidang komite, tetapi lembaga keuangan syariah tidak mengetahui secara pasti apakah itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, lembaga keuangan syariah mendefinisikan hal tersebut sebagai biaya yang harus ditanggung nasabah dengan panduan fatwa DSN-MUI dan opini Dewan Syariah Nasional yang membolehkan penetapan biaya administrasi pembiayaan.

Untuk kelayakan biaya administrasi yang dilakukan pada proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya sangat memerhatikan aspek-aspek teknik administratif. Secara umum dapat kita pahami dari beberapa pendapat imam mazhab mengenai biaya-biaya yang terkait dengan muamalah. Menurut ulama mazhab ada beberapa hal yang berkaitan dengan biaya tambahan dalam pembiayaan, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
2. Menurut Maliki biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual

beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut dibolehkan. Namun memberikan nilai tambahan pada barang itu.

3. Mazhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya secara umum yang timbul dalam transaksi jual beli, namun tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya baik langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya tersebut menambah nilai barang yang dijual.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat empat imam mazhab tersebut, memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, keempat mazhab tersebut sepakat bahwa tidak boleh pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual.

Dalam sistem ekonomi islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas penggunaannya, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah Albaqarah ayat 188, yang artinya sebagai berikut:

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara*

<sup>14</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insa Press, 2001), h. 86.

# 130~ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Dan Denda Di Pegadaian Syariah Lhokseumawe

*kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya".* (Albaqarah: 188)<sup>15</sup>

Telah disebutkan bahwa dalam ekonomi syariah tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas peruntukannya, uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang disepakati untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi, seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan dalam proses transaksi.

Karena itu para ulama sepakat bahwa hukum biaya administrasi yang memang jelas penggunaannya, yaitu untuk kepentingan administrasi terkait kelengkapan alat dan berkas dalam menjalankan transaksi maka dibolehkan, adapun biaya administrasi yang tidak ada kejelasan maka tidak dibolehkan dan tergolong ke dalam riba, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tujuan memberikan pinjaman adalah untuk menghilangkan kesusahan, memberikan bantuan kepada yang

membutuhkan dan menguatkan cinta kasih antar sesama manusia.

2. Pinjaman merupakan hal yang dibolehkan, namun harus dilakukan dengan cara yang benar tanpa membebankan ataupun merugikan orang lain
3. Banyaknya ayat Alquran yang menegaskan larangan memakan harta secara bathil, sehingga biaya administrasi yang tidak jelas penggunaannya termasuk kedalam golongan riba.<sup>16</sup>

## 2. Denda Keterlambatan

Kata denda berasal dari kata *azzara* yang mengandung arti membantu, maksudnya adalah membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan dan membantu keluar dari kesulitan.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, denda adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Denda disini dikenakan apabila terjadi penundaan

<sup>15</sup>Syamil Quran, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung : PT. Sygma Examedia, 2009) h. 49.

<sup>16</sup>Fauzi Perdana Alamsyah, *Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, h. 37.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Group,2003), h. 321

pembayaran yang disengaja oleh nasabah yang tidak ber'itiqad baik untuk membayar pokok angsurannya.<sup>18</sup>

Mekanisme dalam pegadaian syariah adalah fatwa serta aturan hukum yang meliputi ketentuan yang harus dipakai oleh lembaga keuangan syariah dalam masalah berbagai biaya dalam transaksi keuangan, baik itu biaya penitipan barang, biaya administrasi, maupun biaya denda. Seperti dalam halnya ganti rugi (*ta'widh*) yang dikenakan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutang, denda di sini dikenakan apabila penundaan dilakukan dengan sengaja padahal nasabah tersebut mampu untuk membayarnya setelah diberikan peringatan dari pihak lembaga pegadaian yang merupakan *Murtahin* dalam transaksi tersebut.<sup>19</sup>

Hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam hal pembayaran, salah satunya adalah jika terdapat nasabah yang mampu membayar namun mereka menunda-nunda pembayaran dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Oleh karena itu harus ada aturan dan mekanisme yang jelas untuk mengatasi

masalah tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan mekanisme ini adalah fatwa, yaitu ketentuan yang harus disepakati oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi nasabah penerima pembiayaan gadai yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Fatwa DSN membolehkan adanya ganti rugi (*ta'widh*), berdasarkan fatwa DSN No.17 tahun 2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut pada ketentuan umum poin kelima disebutkan bahwa: "sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani".

## E. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>20</sup>

ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala

<sup>18</sup>Alfidnita Rahmawati, *Analisis Biaya Penitipan Dan Denda Keterlambatan Pelunasan Pokok Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 69.

<sup>19</sup>Ani Fitriyani, *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Dalam Pegadaian Syariah*, (Jurnal Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010), h. 67.

<sup>20</sup>A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: AMZAH, 2010). h. 15-16.

permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Sedangkan kata syariah seringkali dipahami sebagai dasar hukum, ini hanya merupakan sebagian pengertiannya saja. Pada dasarnya syariah merupakan serangkaian kewajiban moral yang pertama kali diabadikan dalam Alquran, kemudian diuraikan dan diterapkan melalui teladan kehidupan sunnah nabi, dan akhirnya dibenarkan dan dapat dipercaya secara nalar oleh ummat. Dapat kita simpulkan bahwa hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat manusia.<sup>21</sup>

Tujuan ekonomi syariah adalah sama dengan tujuan dari syariat islam itu sendiri (*Maqashid asy syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyab thayyibah*). Dengan rincian tujuan untuk :

1. Melindungi agama (*hifdzud din*).
2. Melindungi jiwa (*hifdzun nafs*).
3. Melindungi pikiran (*hifdzul aql*).
4. Melindungi harta (*hifdzul maal*).

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 23.

5. Melindungi keturunan (*hifdzun nasab*).<sup>22</sup>

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah berdasarkan cakupan bab-bab dan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi aspek-aspek : *Akad, Ba'I, Syirkah, Mudharabah, Mu'zara'ah, Murabahah, Wakalah, Musaqah, Ta'mim* (asuransi), *Ijarah* (sewa-menyewa), *Kafalah, Wadi'ah, Hawalah, rahn* (gadai) dan *Ju'alah*.<sup>23</sup>

Masih ada beberapa poin lagi terkait ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah dalam KHES, seperti : zakat, *hibah, istisna, salam, ghasb*, obligasi syariah, *dain, waraqah tijarah* dan lain-lain. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada poin ke-14 yaitu *Rahn*. Hukum Ekonomi Syariah tidak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama dari DSN itu sendiri adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam. Selain itu DSN juga berwenang dalam mengeluarkan fatwa dari produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>24</sup> Sejak berdirinya tahun 1999, DSN telah mengeluarkan sedikitnya 53 fatwa tentang ekonomi syariah, salah satunya adalah

---

<sup>22</sup>Ahmadi, *Prinsip Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Garuda Pres, 2014), h. 90

<sup>23</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Tahun 2011, h. 10-15.

<sup>24</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

fatwa tentang *RAHN* yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO. 25 Tahun 2002. Struktur dan format fatwa sudah memadai dengan rumusan yang simpel, namun format fatwa DSN-MUI hanya terbatas memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan belum bersifat *ifadah ilmiah*, yakni belum memberikan kegunaan pencerahan wawasan keilmuan, sehingga kurang memberikan bekal kepada kalangan yang belum mengerti masalah ekonomi syariah secara mendalam. Namun secara singkatnya fatwa-fatwa tersebut bisa digunakan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam dunia perekonomian islam.<sup>25</sup>

Selain fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia kita juga bisa melihat hukum-hukum dan aturan-aturan mengenai perekonomian islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disajikan dalam bentuk bab dan pasal. Dimana Pasal 373 sampai 408 dalam KHES pada BAB XIV yang mengatur tentang *RAHN*. Bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini, walaupun tidak menjelaskan secara khusus tentang biaya administrasi dalam pegadaian syariah, namun kita bisa melihat sisi lain dalam pertimbangan dan pengumpulan materi

terkait masalah gadai. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah, membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga keuangan syariah dan dewan syariah nasional, perkembangan ekonomi syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum ekonomi syariah yang valid dan akurat. Agar seluruh produk ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat secara syar'i. Untuk itulah Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>26</sup>

Antara ekonomi syariah dengan hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>27</sup> Sedangkan hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat manusia.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ..., h. 1.

<sup>28</sup> A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* ....., h. 23.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 131.

## F. Penetapan Biaya Administrasi dan Denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe

### 1. Alasan Dan Tujuan Pegadaian Syariah Menetapkan Biaya Administrasi dan Denda Terhadap Nasabah

Sebagaimana yang disampaikan oleh karyawan pegadaian syariah Lhokseumawe dalam wawancara yang penulis laksanakan dalam beberapa minggu lalu dapat kita pahami bahwa dalam penetapan biaya administrasi di pegadaian syariah Lhokseumawe dialokasikan untuk keperluan administrasi nasabah itu sendiri, yaitu untuk kepentingan dalam melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksir, formulir akad, fotokopi, print out dan lain-lain. Tidak ada unsur pembebanan terhadap nasabah dalam hal penerapan biaya tersebut, karena disesuaikan dengan golongan masing-masing nasabah.

Selama ini belum ada kendala ataupun komentar langsung dari nasabah mengenai biaya administrasi, jika ada beberapa nasabah yang meragukan kebolehan dari penerapan biaya administrasi ini mungkin hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman nasabah dalam hal tersebut. Karena dalam fatwa DSN sudah mengatur dan

membolehkan biaya administrasi tersebut, selama benar pengalokasiannya.

Biaya administrasi yang diterapkan di pegadaian syariah Lhokseumawe disesuaikan dengan golongan dari setiap nasabah, dan golongan tersebut tergantung pada jumlah pengambilan hutang masing-masing nasabah. Dalam wawancara tersebut saudara Muhammad Maulizarizky menjelaskan bahwa tidak ada unsur pembebanan berat dalam penerapan biaya administrasi, bahkan biaya yang diterapkan selama inipun sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*.

Adapun taksiran biaya tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1 Biaya Administrasi Berdasarkan Golongan**

| Golongan | Uang Pinjaman         | Administrasi |
|----------|-----------------------|--------------|
| A1       | 20.000-500.000        | 2.000        |
| B1       | 501.000-1.000.000     | 10.000       |
| B2       | 1.005.000-2.500.000   | 20.000       |
| B3       | 2.550.000-5.000.000   | 35.000       |
| C1       | 5.050.000-10.000.000  | 50.000       |
| C2       | 10.100.000-15.000.000 | 75.000       |

|    |                            |         |
|----|----------------------------|---------|
| C3 | 15.100.000-<br>20.000.000  | 100.000 |
| D2 | 20.100.000-<br>200.000.000 | 125.000 |

Sumber: Pegadaian Syariah (2019).

Adapun mengenai biaya denda yang diterapkan di pegadaian syariah Lhokseumawe sebesar 0,75% per 15 hari hanyalah sebagai faktor pendukung agar dapat menjadi motivasi bagi setiap nasabah untuk membayar hutang tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran dalam waktu yang relatif lama. Karena banyak kejadian dimana nasabah yang menunda pembayaran tersebut bukan karna faktor tidak mampu melainkan lalai dan lupa. Sehingga denda dalam bentuk uang ini kami terapkan sesuai fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Dana yang dihasilkan dari pemungutan biaya denda inipun bukan untuk kepentingan pegadaian, apalagi untuk memperoleh keuntungan, ini sama sekali tidak benar. Karena dana tersebut akan di sumbangkan untuk lembaga-lembaga yang mengadakan berbagai kegiatan yang berguna bagi ummat. Jadi tidak ada pengambilan denda yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Selain itu dalam akad *RAHN* inipun ada *marhun* dimana *marhun*

tersebut bisa dilelang jika memang nasabah tidak mampu membayar hutangnya.

Antara biaya denda dengan hasil dari pelelangan *marhun* itu sangat berbeda. Karena denda dikenakan saat nasabah terlambat membayar tagihan hutang bulanannya padahal nasabah tersebut mampu untuk melunasinya, sedangkan pelelangan *marhun* baru dilakukan jika nasabah memang tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Realita dalam prakteknya banyak nasabah yang mampu untuk membayar dan kebiasaan setiap nasabah setelah dikenakan biaya denda untuk keterlambatan pertamanya nasabah akan lebih menjaga waktu pelunasan angsuran hutang berikutnya.

#### **G. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Biaya Administrasi Dan Denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal penerapan biaya administrasi dan denda di pegadaian syariah, kedua biaya tersebut baru boleh diterapkan jika memenuhi syarat dan ketentuan masing-masing biaya. Sebagaimana yang terkandung dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, kemudian Fatwa Dewan Syariah Nasional

**136~ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Biaya Administrasi Dan Denda  
Di Pegadaian Syariah Lhokseumawe**

No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *RAHN*, baik secara tersurat maupun tersirat dapat kita pahami bahwa penerapan biaya administrasi dibolehkan selama penggunaannya adalah untuk kepentingan administratif dan bukan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak pegadaian. Demikian pula biaya denda atas nasabah yang terlambat melunasi tagihan hutangnya juga dibolehkan dengan syarat pemungutan biaya tersebut sebagai sanksi dalam bentuk bayaran berdasarkan prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *RAHN* itu dibolehkan dalam bagian hukum pada poin pertama, adapun ketentuan umum dalam poin kedua hanya menjelaskan tentang biaya pemeliharaan marhun saja, tidak menyebutkan secara jelas mengenai biaya administrasi dan denda, Namun kita bisa melihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran, dalam fatwa tersebut pada poin pertama menjelaskan mengenai ketentuan umum, sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan ber'titikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari beberapa poin di atas dapat kita pahami bahwa penerapan biaya denda dibolehkan selama penerapan dan penyaluran dana diterapkan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam fatwa di atas. Adapun mengenai biaya administrasi memang tidak disebutkan secara langsung,



namun dalam setiap ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa mengenai ujarah seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *RAHN*, dapat kita pahami bahwa biaya administrasi boleh dibebankan oleh pihak pegadaian kepada nasabah, namun pembebanan biaya tersebut hanya berlaku sebagai imbalan jasa atau ujarah bagi pihak pegadaian untuk sekedar atau selayaknya menutupi biaya pengurusan administrasi pembiayaan yang terjadi dan bukan dalam rangka pengambilan keuntungan tertentu dibalik pembebanan biaya administrasi.

Berdasarkan wawancara dengan 3 orang nasabah pegadaian syariah Lhokseumawe, mereka menerangkan bahwa biaya yang diterapkan selama ini tidak membebani mereka dan jumlah biayanyapun sesuai dengan kesepakatan dalam akad, bahkan dengan adanya biaya denda mereka menjadi lebih termotivasi untuk menjaga waktu pembayaran hutang agar tidak terlambat sehingga lebih mudah dalam transaksi-transaksi berikutnya.<sup>29</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal biaya administrasi dan denda juga menjadi kendala dalam kelangsungan transaksi gadai, namun hal tersebut tidak bisa menjadikan hal-hal yang sudah

dinyatakan kebolehan menjadi tidak boleh, akan tetapi butuh penjelasan dari pihak pegadaian kepada nasabah agar tidak terjadi kesalah pahaman antara nasabah dengan pihak pegadaian.

Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe dalam praktiknya selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah dalam kesepakatan saat akad mengenai biaya-biaya yang akan dibebankan kepada nasabah, baik itu biaya penjagaan barang, biaya administrasi maupun biaya denda bagi nasabah yang terlambat, sehingga dalam hal pelunasan angsuran hutang nasabah akan lebih bertanggung jawab untuk melunasinya tepat waktu. Dalam wawancara dengan salah satu dari ketiga nasabah tersebut beliau menyatakan bahwa belum ada kendala dalam pelunasan hutang selama beliau menggadaikan emas di pegadaian syariah Lhokseumawe, hanya saja beliau sendiri masih kurang paham mengenai hukum dari biaya administrasi dan denda itu sendiri.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan yang diuraikan oleh pihak pegadaian syariah Lhokseumawe saat wawancara beberapa hari yang lalu dapat dipahami bahwa penerapan biaya administrasi dan denda memang mengacu kepada fatwa-fatwa yang

<sup>29</sup>Wawancara Dengan Eli Sasriani, Nasabah Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Senin; 26 Agustus 2019.

<sup>30</sup>Wawancara Dengan Asnita, Nasabah Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Kamis; 29 Agustus 2019.

sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam penerapan biaya administrasi disesuaikan dengan kesepakatan pada saat akad dan taksirannya tergantung golongan dari pokok pinjaman yang diinginkan oleh nasabah. Biaya administrasi tersebut digunakan untuk kepentingan administrasi seperti biaya materai, jasa penaksir, formulir akad, fotokopi, print out dan lain-lain. Adapun biaya denda yang diterapkan selama ini bukan untuk memberikan efek jera kepada nasabah melainkan sebagai motivasi agar nasabah lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil dari pemungutan dana tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi ummat.<sup>31</sup>

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Tujuan dan alasan pegadaian syariah menetapkan biaya administrasi dengan kisaran mulai Rp.2000 hingga Rp.125.000 adalah untuk keperluan administrasi nasabah itu sendiri, yaitu untuk kepentingan dalam melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa

penaksir, formulir akad, fotokopi, print out dan lain-lain. Tidak ada unsur yang memberatkan nasabah dalam hal penerapan biaya tersebut, karena disesuaikan dengan golongan masing-masing nasabah. Adapun biaya denda yang ditetapkan di pegadaian syariah Lhokseumawe sebesar 0,75% per 15 hari bertujuan agar dapat menjadi motivasi bagi setiap nasabah untuk lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Adapun dana yang dihasilkan dari pemungutan denda tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial yang berguna bagi ummat.

Kemudian jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah, baik berdasarkan hukum secara umum dalam Fiqih Muamalah, Fatwa DSN-MUI juga sebagaimana diatur dalam KHES, biaya administrasi dan denda dibolehkan jika biaya administrasi digunakan untuk kepentingan administrasi nasabah dan biaya denda disalurkan untuk kegiatan sosial yang berguna bagi ummat. Setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XIV tentang *RAHN*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang

---

<sup>31</sup>Wawancara Dengan Muhammad Maulizarizky, Penaksir Muda II CPS Lhokseumawe, Selasa; 27 Agustus 2019.

RAHN dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Dan Terjemahannya, Syamil Quran, (Bandung : PT. Sygma Examedia, 2009).
- A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: AMZAH, 2010).
- Abbas Kartadinata, *Akuntansi Dan Analisis Biaya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insa Insa Press, 2001).
- Ahmadi, *Prinsip Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Garuda Pres, 2014).
- Alfidnita Rahmawati, *Analisis Biaya Penitipan Dan Denda Keterlambatan Pelunasan Pokok Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Prenada Group, 2003).
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ani Fitriyani, *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Dalam Pegadaian Syariah*, (Jurnal Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Fauzi Perdana Alamsyah, *Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta : Daar Al Fikry, 2010).
- Iman Firmansyah, *Akuntansi Biaya*, (Bandung: Dunia Cerdas, 2013).
- Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Edisi Revisi Tahun 2011).

**140~ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Biaya Administrasi Dan Denda  
Di Pegadaian Syariah Lhokseumawe**

Mintarjo, *Administrasi Bank*, (Surabaya: Erlangga, 2013).

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Rianto Nur, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (PT. Intermasa, 2003).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Wawancara Awal Dengan Hera Wahyuni, Mahasiswa Universitas Malikussaleh Yang Sedang Menjalankan Praktek Magang di Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Selasa ; 22 Mei 2018.

Wawancara Dengan Asnita, Nasabah Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Kamis; 29 Agustus 2019.

Wawancara Dengan Eli Sasriani, Nasabah Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Senin; 26 Agustus 2019.

Wawancara Dengan Muhammad Maulizarizky, Penaksir Muda II CPS Lhokseumawe, Selasa; 27 Agustus 2019.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).